

## RPJMD Tanah Bumbu akomodir visi misi dan janji politik



**Sumber gambar:**

*<https://kalsel.antaraneews.com/berita/268258/rpjmd-tanah-bumbu-akomodir-visi-misi-dan-janji-politik>*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sudah mengakomodir visi misi dan janji politik bupati terpilih.

"Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yang sudah disusun pada prinsipnya sudah mengakomodir seluruh visi, misi dan janji politik kepala daerah terpilih, hal ini dapat terlihat pada Bab enam RPJMD," kata Bupati Tanah Bumbu H. Zairullah Azhar yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah H. Ambo Saka, di Batulicin Senin.

Dia mengatakan, sumber data yang disajikan pada dokumen RPJMD, diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan seperti BPS dan SKPD teknis terkait, kemudian untuk proyeksi data dibantu oleh tenaga ahli sesuai bidang keahliannya. Selanjutnya, dalam rangka pembahasan RPJMD menghadirkan SKPD teknis didampingi tenaga ahli sesuai bidangnya untuk mengkonfirmasi data-data dan hal-hal yang diperlukan.

Terkait indikator dan target pencapaian yang disajikan dalam dokumen RPJMD sudah mencakup seluruh aspek, baik itu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum dan aspek penunjang urusan. Selanjutnya, sebagaimana diatur pada pasal 255 ayat 5 Permendagri 86 Tahun 2017 bawah Evaluasi

RPJMD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota masing-masing. Terkait RPJMD harus selaras dengan pemerintah pusat, Bupati mengatakan pada prinsipnya dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 sudah selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Pemerintah Daerah akan menjamin adanya keterkaitan, konsistensi antara program pemerintah pusat dengan program yang sudah disusun dalam dokumen RPJMD termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Selanjutnya dalam hal reformasi birokrasi telah diakomodir pada tataran struktur birokrasi dan sumber daya aparatur yang tertuang dalam strategi dan arah kebijakan misi 5 RPJMD. Menanggapi pandangan fraksi terkait sektor pertanian, Pemerintah Daerah akan membangun dan mengembangkan industri hilir, seperti pabrik pengolahan Ikan, pabrik biodiesel, dan lain-lain, hal ini juga sudah diakomodir dan tertuang dalam Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, serta sudah direncanakan pada Renstra SKPD khususnya Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya terkait dengan akses permodalan dan peningkatan skill pelaku pada sektor pertanian hal tersebut sudah diakomodir pada Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD. Terhadap ketersediaan infrastruktur Kesehatan dan layanan Kesehatan gratis, pemerintah menjamin pelayanan kesehatan gratis akan tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berkenaan infrastruktur rumah sakit Pemerintah Daerah berencana membangun rumah sakit khusus penanganan pandemi Covid-19, sementara untuk layanan Kesehatan dasar yang lain akan mengoptimalkan posyadu, klinik-klinik Kesehatan, Puskesmas serta layanan Kesehatan lainnya.

Terkait dengan penyediaan lapangan kerja bagi putra-putri daerah, pemerintah akan melakukan peningkatan kompetensi serta peningkatan jejaring ketenagakerjaan. Kemudian untuk perbaikan kualitas internet guna mendukung pembelajaran Pendidikan jarak jauh ditunjang dengan adanya internet desa yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan pemerintah desa, Provider dan Kementerian Kominfo. Untuk pengembangan infrastruktur dasar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah merencanakan dan melanjutkan pembangunan Jalan serta infrastruktur lainnya sesuai dengan target yang tertuang dalam arah kebijakan pembangunan pada misi dua.

Kemudian, strategi Pemerintah Daerah terhadap persoalan Kemiskinan, Gini Rasio dan Pemerataan Infrastruktur, diantaranya Peningkatan Jaminan Sosial, Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok, Penyediaan Rumah Layak Huni, Peningkatan Keterampilan Masyarakat melalui Balai Latihan Kerja, peningkatan mutu jaringan utilitas Kawasan dan sistem jaringan transportasi.

Selanjutnya Strategi Pemerintah Daerah dalam RPJMD untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah, khususnya kawasan pedesaan adalah melakukan penataan kawasan permukiman di wilayah perdesaan yang masih minim infrastruktur dan sarana prasarana yang layak, misalkan melakukan pembangunan sistem infrastruktur desa, yang terintegrasi dan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat, melalui program bedah rumah serta dalam pengembangan kawasan, pengembangan pedesaan menggunakan indikator indeks membangun desa.

Sedangkan analisis resiko dalam menghitung pencapaian kinerja pembangunan dengan melakukan identifikasi, pemantauan dan pengendalian pengukuran indikator tujuan, sasaran dan program, yang meliputi pelaksanaan strategi dan arah kebijakan. Selanjutnya terkait dengan perbaikan Teknologi Informasi, Pemerintah Daerah secara terus menerus telah mengembangkan dan meningkatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk pelayanan informasi yang dikemas melalui Sistem Pelayanan Berbasis elektronik (SPBE).

Menjawab pandangan umum fraksi terkait strategi dan Arah Kebijakan Pemda dalam Menangani Pasca COVID-19 di RPJM, antara lain: Implementasi dan sosialisasi Protokol Kesehatan (6M: Memakai Masker, Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta Meningkatkan Imunitas dan Melaksanakan Vaksinasi) selama Pandemi Covid-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat kepada seluruh masyarakat. Kemudian, memperkuat layanan dan fasilitas kesehatan hingga seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Penyesuaian aktivitas di seluruh sektor kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kondisi selama pandemi Covid-19 yaitu peningkatan peran serta pemuka agama dalam memberikan pemahaman kepada umat tentang upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan penyesuaian berbagai target pembangunan dengan memperhatikan efek dan dampak dari pandemi Covid-19. Sedangkan untuk Serambi Madinah merupakan sebuah inovasi dalam pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, yang berbasis pada transformasi tatanan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

“Serambi Madinah merupakan jawaban dan pengembangan gagasan dari penancangan Presiden Republik Indonesia tentang revolusi mental,” ucapnya.

Revolusi mental yang diterapkan pada Serambi Madinah berorientasi pada kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Pengukuran yang terintegrasi dengan indeks lainnya oleh karena itu indikator dalam mengukur Serambi Madinah menggunakan indeks kesalehan sosial dan indeks kebahagiaan. Indeks kesalehan sosial sebagai indikator sasaran, yang merupakan alat ukur meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di masa akan datang, yang dilakukan melalui peningkatan ibadah sosial dari semua agama yang ada di Kabupaten Tanah bumbu sehingga berimplikasi positif bagi

kehidupan masyarakat dalam bertoleransi, tolong menolong, kualitas keluarga dan sumber daya manusianya.

"Kesalehan sosial merupakan peningkatan ibadah sosial masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu untuk hidup rukun, damai, saling tolong menolong dan bertamadun (beradab) sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi roda penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam pembangunan daerah," sebutnya.

Untuk pengembangan Infrastruktur terkait dengan Serambi Madinah, Pemerintah Daerah melakukan pembangunan sarana prasana rumah tahfidz di setiap desa dan penguatan karakter lingkungan yang mencerminkan Serambi Madinah dengan menggunakan ornamentasi religi. Menanggapi pandangan fraksi terkait penyediaan lapangan kerja bagi putra-putri daerah, pemerintah daerah akan melakukan peningkatan kompetensi melalui sarana prasarana formal dan non formal sesuai dengan kebutuhan pasar serta peningkatan jejaring ketenagakerjaan dengan merangkul berbagai perusahaan yang berkembang di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya untuk peningkatan Kontribusi PAD setiap tahunnya, Pemerintah Daerah akan mengembangkan kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi baik objek maupun subjek penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/268258/rpjmd-tanah-bumbu-akomodir-visi-misi-dan-janji-politik> , RPJMD Tanah Bumbu akomodir visi misi dan janji politik, 19 Juli 2021.
2. <https://matabanua.co.id/2021/07/21/rpjmd-tanah-bumbu-akomodir-visi-misi-dan-janji-politik/> , 21 Juli 2021.

#### **Catatan:**

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

#### Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Rincian Program Pembangunan

### Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

### Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM)

dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan,

memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.